

GLOBALISASI EKONOMI: KORPORATISASI PERGURUAN TINGGI (PERAN AKUNTANSI DALAM TINJAUAN TEORI KRITIS HABERMAS)

Sri Pujiningsih

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang
pujiningsih23@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan wacana lain dari paradigma kritis dalam menyikapi globalisasi ekonomi, khususnya mengenai liberalisasi jasa pendidikan tinggi. Liberalisasi jasa pendidikan tinggi yang dimotori World Trade Organization (WTO), diawali dengan pengenalan konsep korporatisasi perguruan tinggi. Korporatisasi adalah salah satu strategi implementasi *New Public Management* (NPM) di sektor publik. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian studi kasus di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU). PTN BLU adalah salah satu contoh implementasi NPM. NPM dipropagandakan oleh lembaga-lembaga internasional seperti *World Bank* (WB) dan *Internationally Monetary Fund* (IMF). WB, IMF dan WTO menggunakan akuntansi sebagai *surveillance system*. Dalam tinjauan Teori Kritis Habermas korporatisasi perguruan tinggi merupakan *moneterisasi lifeworld* pendidikan tinggi, dengan media pengendali akuntansi. Dampak dari hal ini adalah terjadinya patologi sosial berupa *loss of meaning*, anomie, dan psikopatologi. Hilangnya makna hakekat perguruan tinggi sebagai lembaga pengembang ilmu yang mengabdikan kepada kemanusiaan telah bergeser menjadi "korporasi" yang memproduksi *knowledge based economy* (KBE) sesuai permintaan pasar. Hilangnya identitas masyarakat akademis, dan gangguan psikologis adalah contoh lain dari patologi sosial akibat korporatisasi perguruan tinggi.

Kata kunci: Habermas, korporatisasi, *lifeworld*, BLU, patologi sosial

Abstract

The objective of this paper is to discourse critical paradigm to respond economic globalization, especially in higher education liberalization. Higher Education liberalization is employed by World Trade Organization (WTO), firstly is introduced concept of higher education corporatization. Corporatization is one of implementation strategy of New Public Management (NPM) in public sector. This paper based on results of case study in one of Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU). PTN BLU is an example of NPM implementation. NPM is campaigned by International Institution such as World Bank (WB) and Internationally Monetary Fund (IMF). WB, IMF, and WTO use accounting as a surveillance system. In Habermas's Critical Theory perspective, higher education corporatization is lifeworld monetization, with accounting as steering media. The effects of that are social pathologies, they are loss of meaning, anomie, and psychopathology. Loss of meaning in higher education as a knowledge development institution, that dedicate to humanism has transform a corporate, that produce knowledge based economy (KBE) according to market demand. Losses of academician identities, psychological disease are other examples of social pathologies.

Keywords: Habermas, corporatization, *lifeworld*, BLU, social pathology

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik dilakukan melalui implementasi *NPM* (Guthrie *et al.*, 1999). Menurut Shin *et al.* (2011), *NPM* menjadi bagian dari *global governance* yang dilakukan WB. BLU, yang merupakan salah satu model *NPM*, lahir atas campur tangan IMF (Asropi, 2007). Tidak ketinggalan, reformasi pendidikan tinggi di Indonesia juga berjalan berkat "bantuan" WB dan IMF (Sulistiyono, 2007). Dengan demikian, keberadaan PTN BLU tidak bisa dilepaskan dari peran dua lembaga internasional tersebut.

NPM adalah bentuk korporatisasi lembaga sektor publik (Marobela, 2008), termasuk organisasi pendidikan (Ngok dan Kwong, 2003). Akuntansi memiliki peran sangat penting dalam implementasi *NPM* khususnya melalui penerapan

akuntansi akrual dan anggaran berbasis kinerja (Hood, 1995; Anderson dan Tengblad, 2009; Neu *et al.*, 2006). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Laporan Keuangan BLU. Karena pentingnya peran akuntansi, maka pola BLU dapat dikatakan sebagai bentuk akuntingisasi (lihat Hood, 1995). Kurunmaki *et al.* (2003) merujuk pada Power dan Laughlin (1992) menjelaskan konsep akuntingisasi adalah suatu proses ketika akuntansi digunakan sebagai alat rasionalisasi ekonomi dan digunakan sebagai sarana akuntabilitas organisasi.

Korporatisasi dan akuntingisasi di perguruan tinggi, dalam tinjauan Teori Kritis Habermas dikatakan sebagai bentuk *moneterisasi lifeworld* pendidikan

budaya dan nilai-nilai pendidikan (Nelson *et al.*, 2008). Moneterisasi dalam konteks ini adalah ketika media uang (akuntansi) digunakan oleh sistem (organisasi) untuk mengendalikan *lifeworld* pendidikan tinggi. Moneterisasi perguruan tinggi telah menimbulkan patologi sosial (Broadbent dan Laughlin, 2005). Berpijak dari hal ini, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana korporatisasi dan akuntingisasi di PTN BLU?

Eriksson dan Kovalainen (2008: 263) mengungkapkan, “*critical research, following the tradition of critical theory*”. Penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Komunikatif Habermas (TTKH), yang termasuk salah satu teori Aliran Kritis. Teori kritis berusaha membaca di balik dunia materi yang tampak dan membuka kesadaran (Salim, 2001: 77). Sementara, menurut Habermas selalu ada pertautan antara kepentingan dan ilmu pengetahuan (Hardiman, 1990). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap “kepentingan” akuntansi dalam praktik PTN BLU, dan membuka kedadaran dan pencerahan kepada masyarakat atas isu PTN BLU.

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIS

Habermas (1987) dalam analisisnya membagi *lifeworld* dan sistem. Bahasa menjadi media asli komunikasi di dalam *lifeworld* untuk mencapai kesepemahaman atau konsensus, namun karena pertumbuhan subsistem yang berasal dari tindakan rasional bertujuan, maka tindakan menjadi dikoordinasi melalui *steering media* uang dan kekuasaan. *Steering media* uang dan kekuasaan menggantikan media “bahasa” untuk koordinasi tindakan *lifeworld*, menjadi *success-oriented action*. (Habermas, 1984: 342). Tindakan berorientasi sukses dapat diartikan seperti dalam filsafat teleologikal yang dalam istilah utilitarian diterjemahkan sebagai tindakan untuk memaksimalkan utilitas (Habermas, 1984: 85). Sebagai contoh individu akan berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan cara yang paling efisien (Appelrouth dan Edles, 2007: 495).

Lifeworld pada organisasi pendidikan adalah budaya dan nilai-nilai pendidikan (Nelson *et al.*, 2008). Sementara, sistem adalah berupa kebijakan, proses, dan prosedur, yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi di

organisasi pendidikan (Nelson *et al.*, 2008). Dalam konteks penelitian ini, sistem adalah PTN BLU, sementara *steering media* adalah pola pengelolaan keuangan BLU beserta praktik akuntansinya. Hal ini mendasarkan pada Broadbent *et al.* (1991), *steering media* dapat terepresentasikan dalam bentuk *legal system* dan praktik pengendalian seperti manajemen dan akuntansi.

Peran akuntansi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan model-model pengukuran organisasai sektor swasta yang menyangkut akuntabilitas, efisiensi, produktifitas, dan efektifitas (McKernan dan McLulich, 2004). Pencapaian efisiensi oleh Habermas (1984: 293) dinyatakan, “*is not constitutive for the "success" of processes of reaching understanding, particularly not when these are incorporated into strategic actions*”. Praktik kehidupan sehari-hari dirasionalisasikan ke arah rasionalitas instrumental, sebagaimana ruang privat yang digerogeti oleh sistem ekonomi, ruang publik pun dilemahkan dan digerogeti oleh sistem administrasi, “*As the private sphere is undermined and eroded by the economic system, so is the public sphere by the administrative system*” (Habermas, 1987: 480).

Dalam konteks penelitian ini, rasionalisasi ekonomi pada organisasi sektor publik melalui implementasi *NPM* (Watskin dan Arington, 2007). Hal ini mengindikasikan bahwa administrasi negara telah dikendalikan oleh subsistem ekonomi melalui media uang. Akuntansi memiliki peran seperti uang dan kekuasaan yang telah mengubah mediasi menjadi kolonisasi *lifeworld* (Laughlin, 1991; Lawrence, 1999). Hood (2000) menyatakan bahwa akuntansi menjadi elemen kunci untuk meningkatkan rasionalisasi ekonomi yang dilakukan oleh birokrat di sektor publik. Ranah publik telah didominasi pranata modern dengan meningkatnya kekuatan kapitalis (Lehman, 2010). Penjajahan kapitalis dilakukan melalui praktik manajerial termasuk akuntansi (Elteren, 2003), seperti tesis “kolonisasi internal” yang dikemukakan Habermas (1987).

Penelitian kolonisasi melalui akuntansi sebagai *steering media* telah dilakukan beberapa peneliti di negara lain (Laughlin, 1991; Broadbent, 1993; Edward *et al.*, 1999; Lawrence dan Sharma, 2002; Oakes dan Berry, 2009). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Svam dan Dialil (2006) serta Opposunggu dar

tetapi menggunakan paradigma positif dengan perspektif Teori Keagenan, sedangkan penelitian ini menggunakan Paradigma Kritis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigm kritis. Studi kasus (kritis) dijadikan strategi untuk memahami realitas akuntansi.. Studi kasus kritis merupakan refleksi kritis atas praktik yang sedang berlangsung, dan kritik terhadap *statusquo* yang mendasarkan pada satu atau lebih Teori Kritis (Myers, 2009: 78). Penelitian ini menggunakan TTKH.

Teori Kritis lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang terjadi dalam konteks tertentu, misalkan satu organisasi (Willis *et al.*, 2007: 87). Penelitian ini dilakukan di salah satu PTN BLU, yang dalam penelitian ini dinamakan UNK. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan anggaran tahun 2011. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain: Pembantu Rektor II, Staf Bagian Anggaran, Ketua Bagian Monitoring dan Evaluasi, Staf Bagian Akuntansi, Staf Bagian Perencanaan, Staf Bagian Dana Masyarakat dan Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI).

Teknik pengambilan data dalam penelitian studi kasus ini menggunakan *multiple source of information* meliputi observasi, wawancara, dokumen dan laporan (Cresswell, 2007:73) dan sumber lain seperti catatan dan artefak fisik (Yin, 2003: 19). TTKH digunakan sebagai alat validasi dan analisis (Humphrey dan Scapens, 1996, Willis *et al.*, 2007: 83).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, pembahasan dalam makalah ini meliputi tiga bagian yaitu korporatisasi, akuntingisasi, dan patologi sosial.

Korporatisasi

Korporatisasi pendidikan tinggi adalah budaya korporasi yang diterapkan dalam institusi pendidikan tinggi (Mok, 2003). Contoh perubahan budaya pada perguruan tinggi adalah seperti dinyatakan oleh Moore (1997), strategi korporasi mulai terinternalisasi dalam perguruan tinggi seperti pernyataan tentang “visi” dan “misi” organisasi (Craig *et al.*, 1999), yang sebelumnya perguruan tinggi menggunakan istilah *goals* dan *objectives* (Ayeni, 2001). Bila dipahami lebih

mendalam, pengadopsian “visi” dan “misi” yang berasal dari budaya korporasi, mengindikasikan kuatnya sistem kapitalis dalam mengubah organisasi pendidikan tinggi untuk dikelola ala korporasi. Menurut Habermas (1987) perubahan tersebut merupakan kolonisasi sistem atas *lifeworld* (terutama dalam struktur budaya perguruan tinggi).

Visi–misi yang menjadi ciri korporasi juga terbaca dalam rencana strategis (renstra) UNK. Salah satu misi UNK yang sangat berkaitan dengan fokus penelitian adalah “membangun organisasi yang sehat dengan menerapkan manajemen korporasi...dengan prinsip transparansi, otonomi dan akuntabilitas”. Manajemen korporasi yang dilakukan UNK, sesuai dengan amanat PP No 23/2005 tentang BLU.

Dominasi tindakan berorientasi sukses yang bekerja dalam sistem telah mengabaikan tindakan komunikatif yang berada dalam *lifeworld*, sehingga cenderung mengolonisasi. Dampak dari kolonisasi antara lain adalah *loss of meaning* dalam struktur budaya perguruan tinggi. *Loss of meaning* atau hilangnya makna budaya pendidikan tinggi di UNK, yang digantikan dengan budaya korporasi. Kutipan berikut ini menggambarkan bagaimana retorika internalisasi budaya korporasi setelah UNK berstatus BLU.

Dengan mengubah *mindset* perorangan nanti akan merubah kulturnya. Jadi *kalo* kultur kelembagaan berubah, semua sudah menyadari bahwa ia datang itu mau mengerjakan apa jelas, ia mau apa, ukuran keberhasilannya tahu dia... kalau itu terus berkembang, maka intisitusi ini di-*manage* dengan profesional katakanlah “semi korporasi” itu bisa... sebenarnya cara kerja atau pola BLU itu kan arahnya bagaimana sesuatu itu *kan* basisnya kinerja, ukurannya kinerja, dia bisa berbuat apa, dia melakukan apa, dia menghasilkan apa, itu ada instrument-instrumen yang mengukur (Pembantu Rektor II).

Korporatisasi perguruan tinggi menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Yang lebih memrihatinkan bahwa UNK secara sadar mengakui pendidikan menjadi komoditas, sehingga layak untuk dipasarkan, seperti kutipan berikut ini:

Karena hukum permintaan dan layanan berlaku, pendidikan menjadi **komoditi**.

Hukum pasar me

didik sebagai konsumen yang akan memilih program studi terbaik. Sebaliknya, keberhasilan pendidikan tinggi akan banyak tergantung pada keberhasilan **pemasaran**, jaminan kualitas yang solid, dan sistem kontrol, serta keefektifan penggunaan (Rencana Induk Pengembangan UNK, 2011-2030, cetak tebal dari penulis).

Korporatisasi juga telah mengubah peran kritis akademisi digantikan oleh peran teknokrat dengan *skill-based* (Saravanamunthu dan Tinker, 2002), yang lebih menekankan pada *job preparation* (Meyer, 2002; Boyce, 2002). Hal ini terlihat jelas dalam pernyataan “pembukaan program studi yang mempunyai prospek masa depan (peluang kerja yang bagus) harus menjadi prioritas” (Lampiran Peraturan Rektor, 2011) dan dalam Rencana Induk Pengembangan 2011-2030 yang berbunyi “Program studi yang harus diperkuat adalah program-program studi yang mengarah kepada sektor industri kreatif”. Fenomena ini seperti ungkapan Habermas berikut ini:

Kecenderungan ke arah yuridifikasi wilayah dunia kehidupan semakin masuk ke dalam hukum ekonomi komoditas dan definisi konsumsi masal ...“sekolah semakin mengambil alih fungsi untuk mencari pekerjaan dan prospek hidup” (Habermas, 1987: 496).

Menurut *WB human capital* dicapai melalui *Education for the Knowledge Economy (EKE)* (McPhail, 2009), *EKE* juga biasa disebut *Knowledge Based Economy (KBE)*. Untuk itu, *WB* mengarahkan pendidikan negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) menuju *EKE* (Neu et al., 2008). *EKE* dirancang untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Dang, 2009). Pertumbuhan ekonomi menurut neoliberalisme dicapai melalui mekanisme pasar. Untuk itu, proses pembelajaran pendidikan tinggi diarahkan sesuai dengan kebutuhan pasar (Donnelly, 2004). *WB* menerjemahkan *EKE* melalui teori privatisasi dan liberalisasi jasa pendidikan tinggi (McPhail, 2009). Ijin operasional perguruan tinggi asing diakomodasi

dalam *pasal 73* UU Perguruan Tinggi No 12 tahun 2012.

Akuntingisasi

Penggunaan akuntansi sebagai alat rasionalisasi ekonomi khususnya dalam implementasi *NPM* disebut sebagai akuntingisasi, yang berpotensi mengolonisasi *lifeworld* (Power dan Laughlin, 1992; Hood, 1991, 1995; Levidow, 2002; Singh, 2002). Menurut Dillard dan Ruchala (2005: 5), “*accounting and accounting systems are central in formulating quantitative and financial representations as well as rational decision models and, therefore, in fostering administrative evil*”. Hal ini menurut Habermas (1987) dinyatakan sebagai bentuk kolonisasi *lifeworld* oleh sistem melalui *steering media* akuntansi.

Akuntingisasi pada organisasi sektor publik telah “meredefinisi” sistem nilai sosial yang telah ada (Power dan Laughlin, 1992). Setelah UNK berstatus BLU, akuntansi telah membentuk sistem nilai baru dalam organisasi. Sistem baru tersebut antara lain: diterapkannya akuntansi berbasis akrual, dibentuknya satuan pengawas internal (SPI) yang berfungsi sebagai internal auditor, dan diselenggarakannya pengauditan oleh auditor independen atas Laporan Keuangan UNK. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi menjadi “bahasa baru” organisasi setelah UNK beridentitas BLU. Penetrasi bahasa akuntansi semacam ini, menjadi bukti adanya akuntingisasi (Lapsley, 2007). Akuntansi menjadi bahasa baru menggantikan budaya organisasi sebelumnya (Power dan Laughlin, 1992: 127).

Bahasa akuntansi terbaca dalam pernyataan informan “ada keahlian akuntansi...supaya terjemahan *policy* itu bisa jelas” menunjukkan *management by accounting*. Hal ini seperti dinyatakan oleh McSweeney (1994), jika menginginkan *good management* dalam sektor publik, maka organisasi harus didefinisikan dengan akuntansi, *management by accounting*. Dalam konteks inilah akuntansi memiliki kekuatan untuk mengubah pola visibilitas organisasi, “*accounting has the power to shift patterns of organizational visibility*” (Hopwood, 1990: 10), terutama visibilitas ekonomi. Visibilitas organisasi melalui akuntansi terutama berkaitan dengan pen
(Broadbent dan Laughli

Proses penyusunan Laporan Keuangan dalam sistem akuntansi mampu mengonstruksi “nilai ekonomi” organisasi, sehingga organisasi lebih *visible* secara ekonomi. Visibilitas ekonomi yang diperankan akuntansi, menjadikannya sebagai *control at distance* (Neu *et al.*, 2008; Oakes *et al.*, 1998). Pernyataan informan, “sistem akuntansi instansi...akan dikonsolidasi dengan satker-satker lain” dan “dengan BLU pelaporan tambah banyak” mengindikasikan adanya pengendalian pemerintah pusat melalui akuntansi (Broadbent dan Laughlin, 2003). Di sini akuntansi sebagai alat *surveillance system* (Edwards *et al.*, 1999) pemerintah untuk melakukan *control at distance* (Neu *et al.*, 2008).

Akuntingisasi mengharuskan aktivitas organisasi dihitung dan dievaluasi dengan teknik akuntansi (Hood, 1995). Sebagai contoh, teknik akuntansi biaya digunakan untuk menghitung *cost* peserta didik (Edwards *et al.*, 1999). Hal ini tertuang dalam Permenkeu No.76/PMK.05/2008 tentang penggunaan akuntansi biaya dalam BLU untuk menetapkan *unit cost* layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial. Fenomena ini diungkapkan oleh beberapa informan, “sekarang RBA dibikin format yang hanya orang akuntansi saja yang tahu, semua komponen kegiatan harus diurai kedalam *fixed cost*, *variable cost*, *direct cost*”. Ungkapan “memilah-milah sesuai perilaku biayanya” dan “kegiatan harus diurai ke dalam *fixed cost*, *variable cost*, *direct cost*” menunjukkan adanya implementasi akuntansi biaya di UNK setelah menjadi BLU. Ini mengilustrasikan proses akuntingisasi, seperti dinyatakan Hood (1995: 93), “*accountingization means the introduction of ever-more explicit cost categorization into areas where costs were previously aggregated, pooled or undefined*”.

Akuntingisasi bertujuan untuk akuntabilitas (Power dan Laughlin, 1992), terutama untuk meningkatkan akuntabilitas finansial (Carnegie dan West, 2005; Ezzamel *et al.*, 2007). Menurut Hood (1995: 94), “*accounting was to be a key element in this new conception of accountability*”. Urgensi peran akuntansi setelah reformasi organisasi sektor publik inilah yang menjadikan tema akuntabilitas melekat dalam

Renstra Kemendiknas¹ dan Renstra UNK. dari hal ini terbaca pentingnya akuntabilitas yang diperankan oleh akuntansi manajemen khususnya anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja akan mendukung legitimasi lembaga di mata pemerintah pusat maupun lembaga internasional. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa akuntansi dimaksudkan untuk melanggengkan dan melegitimasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berlangsung (Richardson, 1987, Ezzamel *et al.*, 2007).

Akuntabilitas melalui akuntansi tidak hanya merupakan justifikasi tindakan, namun juga termasuk proses klarifikasi akan suatu identitas (Townley, 1996). Akuntansi mampu menunjukkan identitas baru organisasi sektor publik. Dalam konteks penelitian ini praktik akuntansi akrual menjadi identitas “baru” setelah UNK menjadi BLU. Ungkapan “laporan ini untuk memenuhi persyaratan BLU”, “kita ingin akuntabilitas setelah BLU” dan “akuntabilitas menggunakan jasa akuntan publik”, menggambarkan bagaimana akuntansi digunakan untuk mengklarifikasi identitas baru UNK sebagai BLU. Hal tersebut dapat dipahami bahwa akuntansi dapat menjamin berlangsungnya ijin penyelenggaraan BLU. Seperti dikatakan Ezzamel *et al.* (2007), akuntabilitas melalui akuntansi digunakan untuk mendapatkan legitimasi keberlanjutan organisasi.

Berikut ini pernyataan dari beberapa informan mengenai hal tersebut. “Kalo laporan keuangan BLU berbasis akrual *kan* arahnya ke laporan eksternal ya Bu... laporan ini untuk memenuhi persyaratan BLU” (Bagian akuntansi). Pernyataan Bagian Akuntansi tersebut mengindikasikan bahwa akuntansi akrual digunakan untuk legitimasi keberlangsungan organisasi.

Menurut Habermas (1976), pemegang kebijakan akan menggunakan simbol-simbol untuk justifikasi tindakannya, seperti *expert judgment*. Melalui *expert judgment*, masyarakat atau sistem sosial akan mengikuti atau menerima kebijakan tersebut. *Expert judgment* digunakan sebagai *bypass* untuk proses pembentukan *value*. Sebagai contoh opini audit, opini membawa simbol bahwa

¹ Tahun 2012, Ke...
Kemendikbud.

penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, pengauditan oleh KAP independen dan pembentukan SPI menyiratkan bahwa UNK telah memenuhi syarat sebagai BLU, sehingga lembaga lebih terlegitimasi sebagai organisasi yang *business-like*.

WB dan IMF merekomendasikan kepada negara yang menjadi “pasiennya” untuk menerapkan akuntansi akrual (Elwood dan Newberry, 2007; Adhikari dan Mellemeviik, 2011) untuk menjalankan *surveillance system*-nya. Menjadi terbukti bahwa pembiayaan WB tidak terlepas dari *bankable activity* (Jones, 2006). *Bankable activity* terpenuhi melalui akuntansi akrual, yang bisa memprediksi solvabilitas maupun likuiditas debitur. Laporan keuangan negara debitur tersebut dijadikan sebagai *long control distance* (Edward, et al., 1999) atau *control at distance* (Robson, 1992). Menurut Neu et al. (2006: 658), “*how supranational institutions such as the World Bank govern from a distance, and how this governance is primarily financial governance*”.

Patologi Sosial

Implementasi anggaran berbasis kinerja pada organisasi sektor publik bisa mengakibatkan patologi sosial. Menurut Robson (1992), “*accounting is both a set of ideas and a set of practices*”. Praktik anggaran berbasis kinerja telah mengubah pemikiran anggota organisasi yang lebih menekankan pencapaian VFM (Laughlin, 1991; Broadbent, 1993; Oakes dan Berry, 2009) dibandingkan *lifeworld* pendidikan tinggi (Boyce, 2002; Singh, 2002). Perubahan cara berpikir ini yang disebut psikopatologi, sebagai salah satu contoh patologi sosial (Broadbent, 2002; Broadbent dan Laughlin, 2005, Oakes dan Berry, 2009).

Anggaran sebagai alat legitimasi tindakan sistem organisasi, mengindikasikan telah meningkatnya tindakan rasional bertujuan dalam *lifeworld* pendidikan tinggi (Habermas, 1984). Menurut Edwards et al. (1999), anggaran berbasis kinerja pada organisasi pendidikan telah meningkatkan rasionalisasi ekonomi *lifeworld* pendidikan. Rasionalisasi dengan *steering media* akuntansi, secara terus menerus oleh Habermas (1987) dinyatakan telah mengambil bentuk kolonisasi. Rasionalisasi *lifeworld*, yang bertujuan

untuk legitimasi tindakan sistem, terbaca pada ungkapan, “kegiatan harus sesuai Rencana Bisnis Anggaran”, “tidak ada anggaran yang digunakan tanpa adanya rencana anggaran yang pasti”, serta “eliminasi kegiatan *nonbudget*”. Hal ini dapat dipahami bahwa kuasa media anggaran untuk mengatur dan melegitimasi tindakan (Oakes dan Berry, 2009). *Lifeworld* pendidikan tinggi tidak lagi mengatur dan melegitimasi tindakan, dan hanya sekedar menjadi bagian dari sistem, seperti yang dinyatakan Habermas (1987).

Jika *steering media* anggaran mengambil bentuk kolonisasi, maka akan mengakibatkan patologi sosial dalam institusi pendidikan. Menurut Robson (1992) patologi sosial akibat kolonisasi melalui anggaran berbasis kinerja, dapat terjadi pada tingkatan individu. Ungkapan “*Activity Based Costing*”, “*at cost*” menggambarkan bagaimana aktor-aktor organisasi telah terbiasa dengan kosa kata akuntansi, sehingga ini mendukung apa yang dikatakan Edwards et al. (1999) bahwa akuntansi telah *colonize the mind*.

Bentuk psikopatologi lain sebagai dampak anggaran berbasis kinerja adalah konflik peran akademisi. Lapsley (2007) menyatakan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja menimbulkan dilema atau dalam istilah yang digunakan Syam dan Djalil (2006) menimbulkan konflik peran, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. “UNK targetnya sekian” dan “targetnya harus jelas”, mengilustrasikan bagaimana bahasa (anggaran) menjadi alat dominasi (Sianipar, dalam Sutrisno dan Putranto, 2004: 14) dalam aktivitas organisasi. Menurut Habermas, melalui bahasa komunikasi menjadi terdistorsi, “kuasa” anggaran berlangsung melalui pencapaian target. Dalam konteks ini, *lifeworld* pendidikan tinggi bukan yang memandu kegiatan sistem. Namun sebaliknya, sistem mengendalikan *lifeworld* melalui *steering media* anggaran. Oleh Habermas (1987) mediatisasi semacam ini telah mengambil bentuk kolonisasi.

Kolonisasi melalui media anggaran, telah mengganggu reproduksi *lifeworld* dalam wilayah sosialisasi berupa hilangnya motivasi dan psikopatologi (Habermas, 1987). Seperti ungkapan salah satu informan “untuk kegiatan seminar teman-teman *pada males* karena harus *at cost* apalagi cuma 6 juta ... tidak ...”

dari penulis). Tuntutan harus *at cost* atas setiap aktivitas organisasi, terkadang memaksa aktor untuk melakukan “penyesuaian”. Ini salah satu dampak tekanan pencapaian efisiensi dalam pola BLU di UNK. Menurut Towler (1998), *NPM* menyebabkan tekanan internal diantaranya peningkatan pengendalian dan peningkatan ketaatan terhadap regulasi.

Gangguan pada wilayah reproduksi kultural berupa hilangnya kebebasan. Hal ini tercermin dari keharusan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja yang pada dasarnya adalah imperatif sistem dari *WB*. Keharusan implementasi anggaran berbasis kinerja di UNK mengindikasikan semakin meningkatnya birokratisasi dan moneterisasi *lifeworld* UNK. Gangguan reproduksi kultural dari struktur masyarakat berupa hilangnya otonomi lembaga karena kinerja lembaga berdasarkan pada ukuran-ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Gangguan pada masyarakat akan memengaruhi perilaku individu. Individu akan menyesuaikan perilakunya sesuai imperatif sistem. Terjadi krisis orientasi di sini, yang mana individu lebih berorientasi ekonomi.

Tabel Patologi Sosial dalam Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di UNK

Gangguan pada Wilayah	Komponen Struktural <i>lifeworld</i>		
	Kebudayaan	Masyarakat	Pribadi
Reproduksi Kultural	Hilangnya kebebasan	Hilangnya otonomi lembaga	Krisis Orientasi Individu
Integrasi Sosial	Integrasi Sistem melalui Anggaran	Anomi	Keterasingan dari Pribadi akademisi
Sosialisasi	Tradisi Korporasi	Motivasi ekonomis	Perilaku Manipulatif

Sumber: data diolah, diadaptasi dari Habermas (1987: 143)

Gangguan reproduksi simbolik pada wilayah integrasi sosial dalam struktur kebudayaan berupa pengambilalihan fungsi integritas sosial, yang sebelumnya lebih mendasarkan pada norma dan ikatan kolegal, digantikan oleh integrasi sistem melalui anggaran berbasis kinerja. Integrasi sistem berdampak pada keterputusan hubungan

norma kolegal sebelumnya dari anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan norma tersebut, karena anggota organisasi harus menyesuaikan dengan norma baru yang terdapat dalam sistem anggaran. Kondisi ini disebut sebagai anomie (Ritzer dan Goodman, 2004: 149). Anomie berdampak pada keterasingan individu dari pribadi akademisi yang seharusnya. Karena kesadaran akademisi digantikan oleh kesadaran semu industrialisasi (Nugroho, 2002: 11)

Gangguan reproduksi simbolik pada wilayah sosialisasi melalui anggaran sebagai *steering media* pada struktur kebudayaan berupa dominasi tradisi korporasi melalui anggaran berbasis kinerja yang didasarkan pada rasionalisasi ekonomi dalam hubungan sosialisasi. Tradisi ini memengaruhi struktur masyarakat yang cenderung berperilaku ekonomis. Motivasi ekonomis terkadang mendorong individu untuk melakukan tindakan manipulatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan PTN BLU di UNK mengindikasikan telah terjadinya korporatisasi. Korporatisasi mendorong terjadinya komodifikasi pendidikan tinggi. Proses komodifikasi didukung oleh akuntingisasi, terutama penggunaan akuntansi akrual dan anggaran berbasis kinerja. Korporatisasi dan akuntingisasi menimbulkan patologi sosial dalam wilayah reproduksi kebudayaan, integrasi sosial, dan sosialisasi. Ketiga wilayah tersebut dalam domain *lifeworld* kebudayaan berupa hilangnya kebebasan, masyarakat berupa anomie, dan individu berupa keterasingan dari pribadi akademisi. Mendasarkan pada temuan penelitian ini, terdapat ruang penelitian berikutnya yaitu bagaimana akuntansi yang dapat “menyembuhkan” patologi sosial tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, P. dan F. Mellemlvik. 2011. The Rise and Fall of Accruals: A Case of Nepalese Central Government. *Journal of Accounting in Emerging economies* 1 (2): 123-143.
- Andersson, T. dan S.Tengblad. 2009. When complexity Meets Culture: New Public Management and The Swedish Police. *Qualitative Research in Accounting & Management* 6 (1): 11-55

- Asropi. 2007. Membangun Key Performance Indicator Lembaga Pelayanan Publik. *Manajemen Pembangunan* 57(I): 1-6.
- Boyce, G. 2002. Now and Then: Revolutions in Higher Education. *Critical Perspective on Accounting* 13(5/6): 575–601.
- Broadbent, J. 2002. Critical Accounting Research: A View From England. *Critical Perspectives on Accounting* (3): 433–449.
- Broadbent, J. dan R. Laughlin. 2005. Organisational and Accounting Change: Theoretical and Empirical Reflections and Thoughts on a Future Research Agenda. *Journal of Accounting & Organisational Change* (1): 7-26.
- Edwards, P., M. Ezzamel dan K. Robson. 1999. Connecting Accounting and Education in The UK: Discourses and Rationalities of Education Reform. *Critical Perspectives on Accounting* 10 (4): 469-500.
- Elteren. M.V. 2003. U.S. Cultural Imperialism Today: Only a Chimera? *SAIS Review*. 23 (2): 169-188.
- Ellwood, S. dan S. Newberry, 2007. Public Sector Accrual Accounting: Institutionalising Neo-Liberal Principles? *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 20 (4): 549-573.
- Eriksson, P dan Kovalianen, A. 2008. *Qualitative Methods in Business Research*. Sage Publication
- Guthrie, J., O. Olson dan C. Humphrey. 1999. Debating Developments in New Public Financial Management: The Limits of Global Theorising and Some New Ways Forward, *Financial Accountability & Management* 15 (3): 209-228.
- Habermas J. 1976. *Legitimation crisis* (Translated by Thomas McCarthy). UK: Blackwell Publisher.
- Habermas J. 1984. *Theory of Communicative Action Volume 1: Reason and The Rationalisation of Society*. (Translated by Thomas McCarthy). USA: Beacon Press.
- Habermas J. 1987. *Theory of Communicative Action Volume 2: Lifeworld and System: a Critique of Functionalist Reason*. (Translated by Thomas McCarthy). USA: Beacon Press.
- Hardiman, F. B. 1990. *Kritik Ideology. Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hood, C. 1995. NPM in The 1980s Variation on Theme. *Jurnal Accounting Organization & Society* 20(2): 93-109.
- Hood, C. 2000. Paradoxes of Public-Sector Managerialism, Old Public Management and Public Service Bargains. *International Public Management Journal* 3: 1-22.
- Jones, P. 2006. *Education, Poverty and the World Bank*. Rotterdam: Sense Publishers
- Lapsley, I. 2007. Accountingization, Trust and Medical Dilemmas. *Journal of Health Organization and Management* 21(4/5): 368-380.
- Marobela. 2008. NPM and The Corporatization of Public Sector in Peripheral Countries. *International Journal Social Economics* 35 (6): 423-434.
- McKernan, J.F. dan K.K. MacLulich. 2004. Accounting, Love and Justice. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 17 (3): 327-360.
- Nelson, S.W., M. G. de la Colina dan M.I D. Boone. 2008. Lifeworld or systemworld: What Guides Novice Principals?, *Journal of Educational Administration* 46 (6): 690-701.
- Neu, D., E. Ocampo Gomez, C. Graham dan M. Heincke. 2006. Informing Technologies and The World Bank. *Accounting, Organizations and Society* 31 (7): 635-62.
- Ngok, K. dan J. Kwong, J. 2003. "Globalisation and educational restructuring in China. In N. C. Burbules and C. A. Torres (Eds.), *Globalisation and Education: Critical Issues*. Palgrave MacMillan: 160-188.
- Nugroho, H. 2002. *Mcdonalisasi Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Oakes, H dan A. Berry. 2009. Accounting Colonization: Three Case Studies in Further Education. *Accounting 20*: 34.

- Ompusunggu, K.B. dan I. Bawono..2006.Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information (*JRI*) Terhadap Informasi Asimetris (Studi Pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri di Kota Purwokerto Jawa Tengah). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang: 23-26 Agustus.
- Ritzer,G. dan D. J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*, Alimandan (Perjemah) Jakarta: Predana Media Group.
- Robson, K. 1992. Accounting Numbers as “inscription”: Action at A Distance and The Development of Accounting. *Accounting, Organizations and Society* 17(7): 685–708.
- Singh, G. 2002. Educational Consumers or Educational Partners: A Critical Theory Analysis. *Critical Perspectives on Accounting* 13: 681–700.
- Sulistiyono, S. T. 2007. Higher Education Reform In Indonesia At Crossroad. *Paper Presented at the Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Nagoya, Japan: 26 July.*
- Syam, F. dan A. Djalil. 2006. Pengaruh Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran: Interaksi Antara Partisipasi Anggaran Dan Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Ukur Kinerja Dengan Orientasi Manajerial (Suatu Penelitian Empiris Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Di Provincesinanggroe Aceh Darussalam) *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang: 24-26 Agustus.*
- Watkins, A.L. dan C. E. Arrington. 2007. Accounting, New Public Management and American Politics: Theoretical Insights into the National Performance Review. *Critical Perspectives on Accounting* 18: 33–58.
- Willis, J. W. 2007. *Foundation of Qualitative Research. Intepretive and Critical Approaches*. USA: Sage Publication.